

Nomor : 3846 /1/HK.00.03/ 9/2025
Tanggal : 16 September 2025

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN REKOMENDASI HAK MILIK ATAS TANAH BAGI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

No	Latar belakang pembentukan peraturan	Analisis dampak	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Analisis dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat	Analisa dengan putusan pengadilan	Keterangan
1.	bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 31/HUK/2004 tentang Tata Cara dan Syarat-Syarat Pemberian Rekomendasi terhadap Badan Sosial untuk Dapat Memperoleh Hak Milik atas Tanah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;	Adanya regulasi mengenai pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi lembaga kesejahteraan sosial yang sudah dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan: 1. Pancasila, Sila ke-5, butir 2 dan 3; 2. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;	Peraturan Menteri Sosial ini selaras dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);	Tidak Ada	Peraturan Menteri Sosial ini terdiri atas IV Bab dan 18 Pasal meliputi: a. ketentuan umum; b. tata cara pemberian rekomendasi; c. pemantauan dan evaluasi; dan d. ketentuan penutup.

Sekretaris Jenderal,

Robben Rico